

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MADRASAH BERBASIS NILAI-NILAI PESANTREN DI MA DARUL HUDA MAYAK

*Khamilatul Husna*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: [khamila822@gmail.com](mailto:khamila822@gmail.com)

*Muhammad Thoyib*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: [thoyib@iainponorogo.ac.id](mailto:thoyib@iainponorogo.ac.id)

### Abstract

*The government implements a quality assurance system in response to various Indonesian quality problems. Madrasah like MA Darul Huda as an educational institution that focuses on general science and religious knowledge in which preserving the values of pesantren needs to implement quality assurance system internally. This paper aims to study the internal quality assurance system of madrasah starting from setting quality standards, quality mapping, quality fulfillment planning, quality fulfillment, and evaluating quality fulfillment based on pesantren values embedded in all madrasa components. The study was conducted at MA Darul Huda Mayak Ponorogo. This study adopts a qualitative approach through case study research. In implementing quality assurance, MA Darul Huda follows government policies by referring to the National Education Standards and all quality policies ranging from quality standards to the implementation of programs and evaluation of quality compliance in accordance with the vision and mission and conditions of the madrasa. The values of pesantren that are embedded in madrasah stakeholders influence the running of quality assurance.*

### Abstrak

Pemerintah mengimplementasikan sistem penjaminan mutu sebagai respon terhadap berbagai permasalahan mutu Indonesia. Madrasah seperti MA Darul Huda sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada ilmu umum dan ilmu agama yang di dalamnya melestarikan nilai-nilai pesantren perlu memberlakukan SPM secara internal. Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari sistem penjaminan mutu internal madrasah mulai dari penetapan standar mutu, pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pemenuhan mutu, dan evaluasi pemenuhan mutu dengan dilandasi nilai-nilai pesantren yang tertanam di seluruh komponen madrasah. Studi dilakukan di MA Darul Huda Mayak Ponorogo. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui penelitian studi kasus. Dalam menerapkan SPMI, MA Darul Huda mengikuti kebijakan pemerintah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan segala kebijakan mutunya mulai dari standar mutu sampai pada pelaksanaan program dan evaluasi pemenuhan mutu disesuaikan dengan visi misi dan kondisi madrasah. Nilai-nilai pesantren yang tertanam pada diri pemangku kepentingan madrasah memberikan pengaruh pada jalannya SPMI.

**Keywords:** Penjaminan Mutu Internal, Mutu Pesantren, Manajemen Pesantren

## PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi bagian penting dalam suatu negara karena pendidikan merupakan proses pematangan hidup. Begitu pentingnya pendidikan maka sangatlah diperlukan pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu merupakan pendidikan yang di dalamnya termuat proses pematangan kualitas peserta didik yang berusaha dikembangkan dengan merubah peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mampu menjadi mampu, menjadi berdaya guna, menjadi jujur, menjadi benar serta berakal dan beriman.<sup>1</sup>

Pendidikan bermutu inilah yang ingin dicapai Indonesia. Namun dalam mencapai pendidikan bermutu banyak masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pendidikan seperti sertifikasi kurikulum pendidikan yang masih pro dan kontra, sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar dan lainnya. Hal ini berarti perlu adanya manajemen mutu yang baik yang perlu dilakukan oleh seluruh penyelenggara pendidikan termasuk madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Tumbuhnya madrasah yang belum menampakkan peningkatan manajemen mutu yang baik menjadikan kualitas masih sulit diharapkan peningkatan mutu madrasah secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa madrasah berdiri tanpa perencanaan yang matang.<sup>2</sup>

Di antara manajemen mutu yang baik salah satunya adalah sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu adalah sistem yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dari awal proses agar memenuhi spesifikasi tertentu. Spesifikasi tertentu ini menunjukkan adanya adanya standar produk.<sup>3</sup> Dalam mendukung penjaminan mutu pendidikan, satuan pendidikan tak terkecuali madrasah seharusnya memenuhi standar yang sudah ditetapkan namun masih banyak yang belum memenuhi standar pendidikan nasional. Di Jawa Timur seharusnya 14.345 lembaga yang terakreditasi namun hanya 10.173 lembaga yang terakreditasi.<sup>4</sup>

Ukuran sekolah yang dikatakan bermutu dalam pandangan pengguna/ penerima manfaat pada umumnya di antaranya sekolah memiliki akreditasi A, lulusan diterima di perguruan tinggi terbaik, hasil UN yang baik dan lainnya.<sup>5</sup> Dalam rangka menjadi lembaga yang bermutu sangat perlu penjaminan mutu baik eksternal maupun internal. Penjaminan mutu internal perlu diberlakukan oleh lembaga pendidikan terutama madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan dua keilmuan yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Lebih khusus lagi dalam penelitian ini adalah madrasah berbasis pesantren yang tak hanya mengembangkan dua keilmuan namun juga berusaha mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai pesantren yang dianutnya.<sup>6</sup>

Penjaminan mutu secara eksternal tidak akan berhasil jika madrasah sebagai satuan pendidikan tidak berupaya menjamin mutu internalnya dan hal ini merupakan kewajiban bagi setiap satuan pendidikan. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki harapan untuk mampu bersaing dan tetap eksis dapat diwujudkan melalui sistem jaminan mutu internal. Sistem jaminan mutu internal ini perlu dikembangkan berkaitan dengan potensi

---

<sup>1</sup> Dedy Mulayazana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 2<sup>nd</sup>2

<sup>2</sup> Deden Makbuloh, *Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 10-14

<sup>3</sup> Ridwan Abdullah Sani et.al., *Penjaminan Mutu Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 6

<sup>4</sup> Harian Bhirawa, *BAN S/M Minta Sekolah Tuntaskan Akreditasi*, <http://harianbhirawa.com/2018/11/ban-sm-minta-sekolah-tuntaskan-akreditasi/>, 14 November 2018

<sup>5</sup> Ridwan Abdullah Sani et.al, *Penjaminan Mutu Sekolah*, 1

<sup>6</sup> Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, 81-87

kekuatan yang dimiliki yang mengarah pada kebutuhan nyata terhadap mutu secara substansial.<sup>7</sup>

Sistem penjaminan mutu internal juga diterapkan MA Darul Huda Mayak sebagai madrasah yang berada dalam lingkungan pesantren yang masih kental dengan nilai-nilai pesantren salafiyah. Madrasah ini dengan sistem penjaminan mutunya mengalami peningkatan murid dari tahun ke tahun (pada tahun 2013 siswa berjumlah 1892, tahun 2017 jumlah siswa 2323, di tahun 2018 siswa berjumlah 2422) serta mampu menjaga eksistensinya dibandingkan madrasah dengan basis yang sama di Ponorogo. MA Darul Huda dianggap memiliki kurikulum yang lengkap oleh masyarakat karena tak hanya mengembangkan ilmu umum dan agama tetapi juga membekali peserta didik untuk berguna di masyarakat dan jenjang selanjutnya seperti program penilaian ibadah amaliyah, karya tulis ilmiah dan muatan lokal kaligrafi dan pengajian sebagai ciri khas MA Darul Huda yang dimasukkannya dalam kurikulum. Salah satu bentuk keberhasilan dari sistem penjaminan mutunya adalah mendapat penghargaan sebagai Madrasah Aliyah dengan jumlah siswa terbanyak yang diterima di PTKIN lewat jalur SPAN-UM-PTKIN<sup>8</sup> dan hasil nilai UAMBNBK yang membanggakan dengan menduduki peringkat di 10 besar teratas di kabupaten Ponorogo dari tiga jurusan peminatan yang ada dan 2 teratas seprovinsi.<sup>9</sup> Selain itu, madrasah selalu menargetkan bahwa siswa siswinya lulus 100 % dan hal sudah dibuktikan namun di beberapa kasus madrasah ini terpaksa tidak meluluskan karena siswa siswinya belum memenuhi kriteria khusus dari madrasah yaitu akhlaqul karimah.<sup>10</sup>

Penelitian ini membahas sistem penjaminan mutu internal yang ada di MA Darul Huda dengan lima poin pembahasan yaitu terkait penetapan standar mutu, pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pemenuhan mutu, dan evaluasi pemenuhan mutu dengan nilai-nilai pesantren di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian studi kasus. Pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berbagai informasi yang telah terkumpul dipilih yang sesuai dengan tema pembahasan untuk disajikan dalam paparan data. Data tersebut disajikan secara sistematis dan utuh sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menyimpulkan. Dalam penelitian ini penyajian data disusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain.

## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MADRASAH BERBASIS NILAI-NILAI PESANTREN**

Satuan pendidikan Islam yaitu diantaranya adalah madrasah sudah seharusnya ikut memajukan pendidikan Indonesia dengan mewujudkan kualitas yang baik melalui penjaminan mutu. Satuan pendidikan yang memiliki kualitas yang baik adalah satuan pendidikan yang bermutu. Mutu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Arcaro, Daming dan Juran yang dikutip oleh Nur Zazin<sup>11</sup> dan yang dikemukakan oleh Edward Sallis adalah kesesuaian produk

---

<sup>7</sup> Deden Makbulloh, *Pendidikan Islam dan Sistem Pejaminan Mutu*, 89

<sup>8</sup> MA Darul Huda, MA Darul Huda dengan Siswa Terbanyak yang Diterima pada Jalur SPAN-UM-PTKIN, <http://www.darulhudamayak.net/ma-darul-huda-dengan-siswa-terbanyak-yang-diterima-pada-jalur-span-um-ptkin/>, 14 Mei 2020

<sup>9</sup> MA Darul Huda, MA Darul Huda Dominasi 10 Peringkat Teratas UAMBNBK Se-Ponorogo, <http://darulhudamayak.net/ma-darul-huda-dominasi-10-peringkat-teratas-umbnbk-se-ponorogo/>, 14 Mei 2020

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ustadz Umar Salim, 7 Januari 2019

<sup>11</sup> Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, 54

baik jasa maupun barang terhadap harapan atau kebutuhan pelanggan yang memerlukan perbaikan terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan dengan biaya yang rendah. Maka sudah selayaknya madrasah terutama madrasah berbasis pesantren sebagai satuan pendidikan diharapkan mampu memberikan jasa pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan para santri dalam menghadapi tantangan di zaman modern saat ini dengan biaya yang relatif mudah dijangkau.

Madrasah sendiri merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan mencerdaskan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan, memberantas kebodohan, serta melatih ketrampilan yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dengan menggabungkan keunggulan pesantren dan keunggulan sekolah. Definisi tersebut merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Muhaimin dan Sutrisno yang dikutip oleh Zainal Arifin.<sup>12</sup> Madrasah sendiri terdapat beberapa tipe di antaranya madrasah diniyah yang mengajarkan ilmu agama secara penuh tanpa ada materi umum dan madrasah formal yang terdapat materi umum dan agama yang berada di lingkungan pesantren atau masyarakat agamis. Dalam penelitian ini, madrasah yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah madrasah formal yang berada di lingkungan pesantren. Madrasah dalam bentuk ini merupakan madrasah formal yang diselenggarakan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dan melatih ketrampilan dengan minat, bakat dan kemampuan yang tertanam nilai-nilai pesantren di dalamnya dan berada dalam naungan pesantren.

Madrasah sebagai salah satu satuan pendidikan tentu ikut bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu cara dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan menerapkan sistem penjaminan mutu internal. Sebagaimana yang dikutip oleh Ondi Saondi<sup>13</sup> sistem merupakan seperangkat unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Permendiknas<sup>14</sup>, Edward Sallis<sup>15</sup>, dan Pedoman penjaminan mutu<sup>16</sup> adalah kegiatan sistemik dan terpadu dalam memberikan jasa pendidikan yang bebas dari kesalahan baik dari input, proses dan output yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan seluruh komponen di dalamnya. Maka sistem penjaminan mutu internal madrasah merupakan sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh madrasah dengan karakteristik lembaga Islam yang tercermin di dalamnya termasuk nilai-nilai pesantren. Nilai-nilai lembaga Islam inilah yang akan mengawal sistem penjaminan mutu sehingga mulai dari input, proses dan output serta dalam tiap tahap penjaminan nilai-nilai tersebut akan memberikan keunggulan karakteristik Islam bagi madrasah sehingga hal inilah yang membedakan dengan lembaga formal lain.

Dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal madrasah, penerapan prinsip-prinsip penjaminan mutu sangat penting. Seperti yang dikemukakan oleh Ridwan Abdullah Sani, et.al., dalam buku *Penjaminan Mutu Sekolah*<sup>17</sup> dalam melakukan penjaminan mutu madrasah harus menyadari seluruh komponen madrasah bahwa penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama tak terkecuali pengasuh pesantren yang menaungi,

<sup>12</sup> Zainal Arifin, *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*, 26

<sup>13</sup> Ondi Saondi, *Membangun Manajemen Pendidikan Berbasis Sistem Informasi*, 169

<sup>14</sup> Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, 6-7

<sup>15</sup> Edward Sallis, *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006) 58-59

<sup>16</sup> Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Dasar Dan Menengah, [Http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf](http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf), 27

<sup>17</sup> Ridwan Abdullah Sani et.al, *Penjaminan Mutu Sekolah*, 32-33

yayasan, komite madrasah dan masyarakat sekitar. Selain itu, madrasah harus melakukan tindakan yang benar dari fase pertama dalam penjaminan mutu agar tidak terjadi atau meminimalisir kesalahan yang terjadi baik di input, proses maupun output. Kemudian iklim organisasi yang kondusif juga menjadi salah satu prinsip yang harus terpenuhi. Madrasah harus menjadikan seluruh komponen madrasah menjadi tim yang kompak dan memiliki komunikasi yang baik sehingga memudahkan dan memperlancar proses penjaminan mutu yang berjalan.

Pemerintah sendiri telah melakukan penjaminan mutu dengan melakukan akreditasi melalui BAN-SM. Pemerintah juga telah menetapkan sistem penjaminan mutu yang hendaknya dilakukan oleh satuan pendidikan termasuk madrasah berikut dengan pedoman pelaksanaan penjaminan mutu internal. Sistem penjaminan mutu internal tersebut diperjelas lagi oleh Ridwan A. Sani, et.al., dalam buku *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*<sup>18</sup> yang mengungkapkan sistem penjaminan mutu internal dilakukan dengan lima langkah yaitu menetapkan standar, menetapkan mutu, merencanakan pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu.

Dalam menetapkan standar madrasah harus disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan nilai-nilai pesantren yang tercermin di dalamnya. Selain itu, madrasah harus menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan agar pelaksanaan tidak terdapat hambatan. Kemudian madrasah membuat juga menetapkan standar didasarkan prioritas terkait hasil dan proses pembelajaran.

Melakukan pemetaan mutu dalam proses penjaminan mutu internal madrasah dengan menentukan indikator mutu terlebih dahulu. Indikator ini ditetapkan berdasarkan SNP jika madrasah masih dalam taraf memenuhi SNP. Namun madrasah juga dapat menetapkan indikator melampaui SNP jika madrasah telah memenuhi seluruh SNP. Indikator tersebut juga disesuaikan dengan nilai-nilai pesantren. Kemudian menyusun instrumen, mengumpulkan data EDS dan menganalisisnya serta menetapkan akar masalah. Dalam proses pemetaan mutu ini madrasah dapat melakukan dengan menerapkan nilai-nilai pesantren seperti nilai demokrasi dan nilai lainnya dalam setiap prosesnya karena nilai pesantren tersebut telah tertanam dan terbiasa diterapkan dalam setiap aktivitas para pemangku kepentingan madrasah.

Kemudian menyusun rencana pemenuhan mutu yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator yang telah tercerminkan nilai-nilai pesantren. Hal ini melibatkan seluruh *stakeholder*. Selain itu, penyusunan rencana mutu didasarkan pada analisis EDS dengan menggunakan alat bantu manajemen.

Dalam pelaksanaan mutu ini tentu nilai-nilai pesantren yang tertanam pada seluruh *stakeholder* madrasah hadir untuk mempermudah jalannya pemenuhan mutu. Mengimplementasikan pemenuhan mutu ini dilakukan dengan menetapkan penanggung jawab program, alokasi pendanaan terlebih dahulu. Namun penetapan tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi. Setelah semua terlaksana maka seluruh penanggung jawab harus melakukan pelaporan program.

Setelah seluruh rencana pemenuhan terlaksana madrasah melakukan evaluasi pemenuhan mutu dengan menyusun rencana evaluasi terlebih dahulu, kemudian membuat indikator dan instrumen evaluasi. Setelah menyusun rencana evaluasi kemudian dilakukanlah pelaksanaan evaluasi dan analisis hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut madrasah harus

---

<sup>18</sup> Ridwan A. Sani et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 32-35

menyusunan rekomendasi guna menetapkan standar baru atau memperbaiki perencanaan pemenuhan mutu agar pelaksanaan pemenuhan mutu berjalan maksimal.

Dalam penjaminan mutu memerlukan nilai-nilai yang tertanam dalam perilaku, pembina, penyelenggara, dan pelaksana pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan Nanang Fattah<sup>19</sup> bahwa nilai-nilai yang diperlukan tersebut adalah kejujuran, kepercayaan, keunggulan, komitmen, kompetisi, kredibilitas, kemadirian dan akuntabilitas. Hal ini pula yang terdapat dalam pesantren yaitu Nilai keilmuan, kemandirian, tanggung jawab, kesederhanaan, sosial, kebersamaan, demokrasi, kepemimpinan, spiritual dan moralitas. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai pesantren yang diungkapkan oleh Muskinul Fuad.<sup>20</sup> Nilai memiliki pengertian prinsip yang menjadi dasar operasi dan pencarian organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Sebagaimana penjaminan mutu memiliki prinsip maka jika prinsip tersebut ditambahkan nilai-nilai pesantren maka penjaminan mutu akan berjalan lebih baik karena antara nilai yang dibutuhkan dalam penjaminan mutu dan nilai-nilai pesantren memiliki kesamaan. Hal ini menunjukkan peran penting pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam yang menekankan pentingnya moral keagamaan untuk diterapkan dalam keseharian dalam melahirkan dan menanamkan nilai-nilai baik untuk penjaminan mutu sebagaimana disebutkan sebelumnya.

## **IMPLEMENTASI SPMI BERBASIS NILAI-NILAI PESANTREN DI MA DARUL HUDA**

### **1. Penetapan Standar**

Dalam penetapan standar. MA Darul Huda menyusun standar mutu dengan melakukan penyesuaian terhadap Standar Nasional Pendidikan dan visi misi madrasah serta kondisi madrasah. Adanya penyesuaian ini menunjukkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan di MA Darul Huda ini memiliki prinsip terstandaryang berarti bahwa SPMI menggunakan acuan mutu minimal SNP dan dapat ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP.<sup>21</sup>

Hal tersebut juga menunjukkan adanya idealism pemangku kepentingan madrasah yang berpengaruh pada standar mutu yang ditetapkan. Idealism merupakan salah satu hal yang diarahkan dalam kultur pesantren.<sup>22</sup> Dalam hal ini MA Darul Huda menetapkan kemampuan akademis dan akhlakul karimah untuk dijadikan standar mutlak madrasah sebagai bentuk nilai tanggung jawab madrasah terhadap masa depan peserta didik.

Madrasah Aliyah Darul Huda dalam menetapkan standar juga disesuaikan dengan visi misi dan kondisi madrasah. Hal ini mengindikasikan bahwa madrasah dapat mengembangkan dan mengimplementasikan SNP yang telah menjadi acuan mutunya. Standar mutu harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan, dan kondisi satuan pendidikan.<sup>23</sup> Hal ini juga selaras dengan prinsip penjaminan mutu mandiri dan partisipatif yang berarti mampu mengembangkan dan mengimplemntasikan dengan membangun partisi aktif dari seluruh

---

<sup>19</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, 7

<sup>20</sup> Muskinul Fuad, *Model Pengembangan Kerpibadian Muslim di Pesantren*, 63-74

<sup>21</sup> Ridlwan A. Sani et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan* (Tangerang: Tsmart Printing, 2018), 31

<sup>22</sup> Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 242

<sup>23</sup> Ridlwan A. Sani et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 55

pemangku kepentingan.<sup>24</sup> Pada mekanisme kehidupan pesantren, kemandirian tercermin saat santri dibiasakan untuk dapat mengatur kebutuhan pribadi secara mandiri seperti mengatur keuangan, mengatur waktu dan lainnya.<sup>25</sup> Nilai kemandirian ini merasuk pada diri *stakeholder* madrasah dengan ditunjukkannya kemampuan madrasah mengembangkan standar sesuai visi dan misi serta kondisi madrasah. Kemandirian ini secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan yang diambil madrasah dalam penetapan standar. Selain itu, adanya penyesuaian terhadap visi misi dan kondisi madrasah menunjukkan sikap toleran madrasah yang mencerminkan nilai sosial yang dimiliki oleh pemangku kepentingan.

Dalam beberapa standar yang ditetapkan oleh madrasah yang disebutkan secara rinci dalam rencana kerjanya mengandung beberapa ciri khas pesantren, di antaranya sebagai berikut:

a. Standar isi

Pada standar isi, madrasah melakukan pengembangan kurikulum dan pengembangan pribadi peserta didik yang telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang ada dalam SNP dan karakteristik budaya pesantren. Bentuk pengembangan kurikulum tersebut di antaranya adalah program lintas peminatan, adanya muatan lokal kaligrafi dan kajian kitab kuning dan mengadakan ekstrakurikuler dan pengembangan bakat.

b. Standar proses

Standar proses di MA Darul Huda meliputi pengembangan silabus dan RPP yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kondisi lingkungan pesantren, menyediakan dan mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan ciri khas pesantren, menyediakan dan mengembangkan proses pembelajaran aktif dan menyenangkan dengan metode-metode pembelajaran yang inovatif, dan mengawasi serta mengendalikan proses pembelajaran dengan bekerja sama dengan berbagai pihak.

c. Standar kompetensi lulusan

MA Darul Huda mensyaratkan setiap lulusan memiliki SKL yang baik yaitu dengan memiliki nilai akademik yang baik dengan memenuhi nilai KKM madrasah dan lulus UN dan ujian lainnya. Selain itu, madrasah mensyaratkan lulusan memiliki prilaku dan akhlak yang baik sebagai lulusan madrasah dan pesantren dengan menunjukkan prilaku yang sesuai nilai-nilai pesantren dan masyarakat pada umumnya. Untuk melengkapi sisi akademik dan akhlak, madrasah membekali lulusan di antaranya dengan ibadah-ibadah amaliah agar mandiri dan berguna bagi masyarakat dilingkungannya.

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

MA Darul Huda menetapkan jumlah, kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebijakan pemerintah seperti tenaga pendidik dan kependidikan harus berpendidikan S-1. Madrasah juga memiliki persyaratan khusus terhadap pendidik dan tenaga pendidik untuk dapat membaca dan menulis al-Qur'an serta taat beribadah agar sesuai dengan nilai-nilai madrasah dan pesantren. Madrasah juga mengembangkan potensi pendidik dan tenaga pendidik melalui workshop agar kinerja semakin baik. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan narasumber dari lingkungan madrasah maupun dari luar madrasah.

e. Standar sarana dan prasarana

---

<sup>24</sup> Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Dasar Dan Menengah, [Http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf](http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf), 27

<sup>25</sup> Muskinul Fuad, *Model Pengembangan Kerpibadian Muslim di Pesantren* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), 63-74

Dalam hal ini, madrasah menetapkan standar untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah dan melakukan pemeliharaan dengan baik terhadap kondisi sarana dan prasarana agar kegiatan pembelajaran kondusif dan nyaman. Hal ini dilakukan dengan berusaha menyediakan fasilitas yang belum ada, memperbaiki fasilitas yang rusak, melakukan pengecekan secara berkala.

f. Standar pengelolaan

MA Darul Huda menetapkan standar pengelolaan dalam bentuk pelengkapan seluruh data penting yang wajib dimiliki madrasah seperti visi misi, EDM, RKM, RKTm dan lainnya serta mengadakan sosialisasi. Madrasah melibatkan komite madrasah dan masyarakat dalam penyusunan data madrasah dan melibatkannya dalam kegiatan akademik dan nonakademik. Dalam keterlibatan masyarakat, madrasah membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan. Komunikasi yang baik harus didukung dengan informasi yang handal dan valid, maka madrasah mengelola dan menyediakan informasi yang akurat cepat dan mudah di akses dengan memanfaatkan beberapa aplikasi media sosial.

g. Standar pembiayaan

Standar pembiayaan madrasah ditetapkan dalam bentuk perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui pelaporan keuangan. Madrasah mendapatkan sumbangan dari berbagai pihak dengan menjalin hubungan dengan berbagai pihak seperti alumni, yayasan, komite madrasah, orang tua murid, pemerintah dan mempermudah akses penyaluran dana dari peserta didik seperti melalui virtual account. Madrasah juga mempermudah pembiayaan pendidikan dengan memberikan kelonggaran bagi siswa tidak mampu dengan membawa persetujuan pengasuh. Madrasah juga menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan dalam sistem bisyaroh yang diartikan sebagai tanda jasa bukan gaji.

h. Standar penilaian

Standar penilaian di MA Darul Huda menggunakan empat aspek penilaian dari penilaian rapot, penilaian ibadah amaliah dan praktek bahasa, karya tulis ilmiah, dan penilain prilaku melalui sistem penskoran untuk setiap pelanggaran. Penilaian dilakukan menggunakan berbagai jenis penilaian yang meliputi hasil ujian, ketrampilan, praktek dan portofolio. Hasil nilai dilaporkan kepada orang tua murid dengan cepat tepat dan akurat melalui media yang mudah dijangkau seperti *WhatsApp*.

MA Darul Huda mensosialisasikan standar mutu dalam bentuk visi misi madrasah melalui pertemuan resmi dan media cetak dan bisa diakses oleh seluruh pihak. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan mutu dalam menghasilkan output yang berprestasi dari sisi akademis dan akhlak yang baik. Sosialisasi ini menunjukkan bahwa MA Darul Huda memiliki prinsip sistematis dan berkelanjutan serta transparan dan akuntabel yang berarti seluruh aktivitas dalam SPMI terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.<sup>26</sup> Keterbukaan dan kejujuran merupakan di antara nilai moral yang selalu dianjurkan di pesantren. Nilai moralitas sendiri bersumber dari nilai ketuhanan yang akan mengarahkan peserta didik berperilaku baik.<sup>27</sup>

Sosialisasi yang dilakukan di MA Darul Huda ini dimaksudkan untuk memberi kesadaran terhadap pihak-pihak terkait seperti guru dan wali murid. Penetapan standar sendiri

<sup>26</sup> Ridlwan A. Sani et.al, Sistem Penjaminan Mutu Internal: *Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 31

<sup>27</sup> Muskinul Fuad, *Model Pengembangan Kerpibadian Muslim di Pesantren* 63-74

memerlukan sebuah komitmen dan dukungan sumber daya internal serta bantuan berbagai pihak yang dilibatkan dalam meningkatkan mutu.<sup>28</sup> Hal ini menyiratkan nilai keakraban dan kebersamaan yang ditanamkan di pondok pesantren yang sekaligus menjadi ciri khasnya. Keakraban di pesantren ditunjukkan dengan adanya hubungan personal antara kyai dan santri dalam situasi yang kondusif.<sup>29</sup>

## 2. Pemetaan Mutu

Pemetaan mutu yang dilakukan MA Darul Huda diawali dengan Evaluasi Diri Madrasah. Dalam pemetaan mutu satuan pendidikan harus melakukan kegiatan evaluasi diri setelah menetapkan standar guna melihat sejauh mana standar tersebut tercapai.<sup>30</sup> Dalam hal ini, madrasah mencerminkan nilai moral yang dianutnya yaitu melestarikan metode lama yang baik dan mengambil baru yang lebih baik. Dengan adanya evaluasi, madrasah akan mengetahui kelebihan yang dapat madrasah kembangkan dan menemukan solusi untuk menutup kekurangan dengan hal yang baru yang lebih baik. Selain itu, menyiratkan kepercayaan diri madrasah bahwa mereka siap menyongsong masa depan. Kepercayaan diri ini merupakan sebuah budaya yang dilestarikan di pesantren yang menjadi nilai moral bagi para santri.

EDM di MA Darul Huda disusun berdasarkan informasi yang diperoleh Tim Pengembang Madrasah dari seluruh pendidik dan tenaga kependidikan madrasah dan pemangku kepentingan madrasah seperti komite dan orang tua wali murid. Pelaksanaan EDS seharusnya dilakukan dengan jujur dan akurat dengan melibat berbagai pihak yaitu pengawas sekolah, orang tua peserta didik, alumni, unsur Pemda, tokoh masyarakat, dunia usaha dan industri dan pihak lain yang penting.<sup>31</sup> Keterlibatan berbagai pihak dalam EDM menunjukkan nilai kebersamaan yang telah dibangun oleh MA Darul Huda.

Informasi dalam EDM MA Darul Huda diperoleh melalui pertemuan resmi seperti rapat guru, PWM, melalui kritik dan saran komite sekolah, yayasan, pengurus pondok dan pengasuh, serta bertanya langsung pada peserta didik. Pendekatan yang dapat digunakan dalam EDS dapat berupa wawancara, diskusi kelompok dan refleksi dengan melakukan sosialisasi pada seluruh responden tentang kegiatan pengumpulan data, menyebarkan seluruh instrumen pada seluruh responden dan kemudian mengumpulkan hasil responden dan dapat didukung dengan melakukan analisis dan memperkaya data EDS secara kualitatif yang melibatkan *stakeholder* yang mengetahui kondisi sekolah.<sup>32</sup> Dalam pemetaan mutu satuan pendidikan dapat melakukan lima langkah kunci yaitu pengembangan instrumen, pengumpulan data, analisa data, penentuan akar masalah dan penyusunan rekomendasi.<sup>33</sup>

Proses EDM di MA Darul Huda dimulai dari pembentukan TPM, pelatihan instrumen, pelaksanaan EDM melalui rapat TPM yang membahas kelebihan dan kekurangan serta rekomendasinya dengan instrumen yang telah ditentukan serta melakukan pemrioritasan terhadap rekomendasi tersebut. EDS memerlukan instrumen yang didasarkan pada standar nasional dan dikembangkan sesuai kondisi masing-masing sekolah.<sup>34</sup> Adanya pelatihan sebelum melakukan EDM juga menunjukkan nilai keilmuan. Hal ini merupakan identitas

---

<sup>28</sup> Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 55

<sup>29</sup> Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2008) 167-168

<sup>30</sup> Ridlwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 33

<sup>31</sup> Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 90

<sup>32</sup> *Ibid*, 101-103

<sup>33</sup> *Ibid*, 103

<sup>34</sup> *Ibid*, 93

kultural pesantren karena kehidupan pesantren adalah proses pendidikan atau pencarian ilmu.<sup>35</sup> Pesantren memiliki keyakinan bahwa amal tanpa ilmu merupakan hal yang sia-sia. Jika pelaksanaan EDM dengan instrumen yang ada tanpa adanya pemahaman akan instrumen tersebut maka hal tersebut juga tidak akan menuai hasil yang diharapkan. Selain itu, adanya pemrioritasan rekomendasi merupakan hal yang sesuai dengan nilai yang diterapkan pesantren yaitu mengambil hal baru yang lebih baik sebagai bentuk nilai moralitas.

### 3. Perencanaan Pemenuhan Mutu

Madrasah Aliyah Darul Huda menyusun perencanaan pemenuhan mutu dalam bentuk RKM (rencana kerja 4 tahun) dan RKTm (rencana kerja 1 tahun). Bentuk perencanaan pemenuhan mutu pada umumnya berupa rencana kerja tahunan yang berupa penjabaran rinci dari rencana kerja menengah (4 tahun).<sup>36</sup> Hal ini menunjukkan madrasah secara mandiri mampu merencanakan pemenuhan mutu dengan sistematis.

RKM dan RKTm disusun untuk dijadikan rambu-rambu dalam pengelolaan program, implementasi, *monitoring* dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur, sebagai dorongan dalam peningkatan profesionalisme guru dan mutu pendidikan, membantu mengatur keuangan madrasah, untuk merespon tuntutan partisipasi masyarakat, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas. Rencana kerja sekolah menurut Ridwan Abdulah Sani et.al. digunakan sebagai pedoman kerja, dasar dalam mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pengembangan sekolah dan bahan acuan guna mengidentifikasi dan mengajukan sumber daya pendidikan dibutuhkan yang bertujuan untuk mengetahui dengan rinci tindakan yang harus dilakukan dan memperhitungkan pemenuhan standar dengan kondisi nyata.<sup>37</sup> Hal tersebut mencerminkan madrasah yang berusaha memperbaiki diri secara terus menerus dengan adanya rencana kerja yang disusun untuk jangka waktu tertentu. Keinginan madrasah memperbaiki diri ini menunjukkan nilai moralitas yang selalu diajarkan dipondok pesantren yang berusaha menjadi pribadi yang sholeh.

Selain itu, rencana kerja madrasah juga memiliki peran untuk membantu mengatur keuangan secara efektif dan efisien yang menunjukkan nilai kemandirian dan kesederhanaan. Mengatur keuangan merupakan salah satu hal yang dibiasakan pada santri di pesantren. Hal ini sebagai bentuk kemandirian santri dalam menggunakan berapapun uang yang diberikan orang tua kepadanya untuk memenuhi kebutuhannya selama di pesantren tanpa adanya pemborosan. Peran rencana kerja sekolah sebagai respon tuntutan masyarakat, mengisyaratkan nilai moralitas untuk saling menghargai dan memberikan hak masyarakat dan orang tua sebagai pengguna jasa. Peran penting rencana sekolah sebagai bentuk peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas merupakan sebuah nilai moralitas madrasah dalam bentuk kejujuran. Menurut Yusuf Umar, melalui madrasah akan mendapat informasi yang menjadi umpan balik bagi madrasah dan menjadi jaminan bagi orang tua siswa bahwa madrasah selalu memberikan pelayanan yang terbaik.<sup>38</sup>

RKM MA Darul Huda disusun berdasarkan hasil dari identifikasi dan analisis kondisi madrasah, harapan pemangku kepentingan, dan tantangan madrasah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ridwan A. S. et.al. yang menyatakan bahwa perencanaan mutu pada umumnya didasarkan pada hasil pemetaan mutu, kebijakan pendidikan nasional,

<sup>35</sup> Muskinul Fuad, *Model Pengembangan Kerpibadian Muslim di Pesantren*, 63-74

<sup>36</sup> Ridwan A. Sani, et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 114-

<sup>37</sup> *Ibid*,

<sup>38</sup> Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, 153-154

daerah dan satuan pendidikan itu sendiri berikut dengan rencana strategis pengembangan satuan pendidikan.<sup>39</sup> Penyusunan yang didasarkan hasil pemetaan mutu dan standar mutu menunjukkan kemampuan menyesuaikan madrasah dalam segala kondisi. Hal tersebut memunculkan nilai kemandirian sebagaimana di pesantren yang mengajarkan para santri untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat yang berbeda-beda karakter.

Dalam penyusunan RKM, MA Darul Huda menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel dan demokratis. Rencana kerja madrasah ini bersifat partisipatif, transparan, multi sumber, dan komprehensif. Hal tersebut sesuai dengan asas yang dimiliki oleh sistem penjaminan mutu yang berupa komitmen semua pihak, kepatuhan terhadap regulasi, dorongan internal, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan pencitraan.<sup>40</sup> Adanya prinsip atau asas yang dibangun madrasah dalam penyusunan rencana kerja menyiratkan nilai kesederhanaan, nilai tanggungjawab, nilai demokrasi, nilai kebersamaan, dan nilai moralitas. Hal tersebut merupakan macam-macam nilai yang diajarkan pesantren pada santrinya.<sup>41</sup>

Rencana kerja madrasah disusun melalui tim-tim yang terdiri dari para guru, keuangan, staf administrasi, pihak keuangan serta perwakilan masyarakat dan komite. Tim akan dibagi menjadi delapan sesuai SNP yang akan merumuskan rencana kerja sesuai standar yang ditentukan pada tim tersebut. Hasilnya akan dibahas dalam rapat untuk disesuaikan dengan hasil pemetaan mutu dan SNP kemudian disepakati bersama. Program yang ditetapkan berdasarkan sasaran satuan pendidikan dengan melibatkan pihak lain seperti komite dan masyarakat.<sup>42</sup> Hal ini menunjukkan bahwa madrasah sangat menyadari akan pentingnya kerjasama dan gotong royong di antara para pemangku kepentingan sebagai bentuk nilai kebersamaan dan demokrasi dengan adanya metode musyawarah.

Tahap perumusan rencana kerja meliputi merumuskan program madrasah dan menyusun jadwal kegiatan. Dalam perumusan program madrasah meliputi empat langkah yang meliputi menetapkan sasaran, menentukan indikator keberhasilan, menentukan kegiatan dan menetapkan penanggung jawab. Hal ini sesuai dengan rencana pemenuhan mutu menurut Ridwan Abdullah Sani et.al. yang mengungkapkan bahwa rencana pemenuhan mutu berisikan tanggung jawab pelaksanaan, kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran keberhasilan.<sup>43</sup> Hal ini menunjukkan nilai kemandirian madrasah dalam mengatur program dan kegiatan sedemikian rupa agar komprehensif.

RKTM MA Darul Huda sendiri disusun berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Madrasah pada tahun sebelumnya, pelaksanaan rencana program dan kegiatan RKM, dan disesuaikan dengan Permendiknas. Penyusunan rencana pemenuhan mutu dalam buku *Sistem Penjaminan Mutu Internal* dirumuskan berdasarkan EDS dan mengacu pada visi misi dan tujuan sekolah yang sudah disesuaikan dengan kebijakan nasional dan daerah. EDS yang telah dilakukan sekolah merupakan indikator *baseline* yang akan ditingkatkan sehingga standar yang ditetapkan dapat dipenuhi.<sup>44</sup> Madrasah tidak menginginkan perencanaannya menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penyesuaian tersebut menunjukkan kepatuhan terhadap pemerintah yang berarti madrasah

---

<sup>39</sup> Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 33-34

<sup>40</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2012) 9

<sup>41</sup> Muskinul Fuad, *Model Pengembangan Kerpibadian Muslim di Pesantren*, 63-74

<sup>42</sup> Ridlwan A. Sani et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 117-118

<sup>43</sup> *Ibid*, 114-115

<sup>44</sup> Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 113

mengimplementasikan nilai kepemimpinan sebagaimana di pesantren yang selalu mengajarkan santri untuk taat pada kyai. Kyai sebagai pemimpin tertinggi mengarahkan pesantren sesuai visi yang dituju yang membawahi para ustadz yang konsen mendidikan dan mengajar, dan pengurus pondok sebagai salah satu bagian yang berada dibawah kyai.<sup>45</sup>

Tahap perumusan RKM MA Darul Huda meliputi perumuskan rencana strategis madrasah yang dilakukan melalui enam langkah yaitu menetapkan sasaran, merumuskan program, menentukan indikator keberhasilan, dan menentukan kegiatan, menetapkan penanggungjawab dan menyusun jadwal kegiatan. Kemudian merumuskan rencana rutin madrasah dengan langkah yang sama. Penentuan program dan kegiatan dalam memberikan layanan bermutu dengan target memenuhi atau melampaui SNP harus memuat jadwal dan tahapan yang jelas.<sup>46</sup> Seperti penjelasan sebelumnya, dalam hal ini madrasah menunjukkan nilai kemandiriannya dalam rangka penjaminan mutu.

Setelah selesai menyusun rencana kerja, madrasah akan menyusun anggaran untuk tiap program dan kegiatan yang disesuaikan dengan sumber dana agar pemanfaatan dana madrasah dialokasikan secara efektif dan efisien. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, hal ini merupakan bentuk nilai kemandirian dan kesederhanaan yang selalu ditanamkan di pesantren.

#### 4. Pemenuhan Mutu

Program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam RKM dan RKTm akan menjadi acuan pelaksanaan pemenuhan mutu namun terkadang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya karena keterbatasan waktu dan tempat atau kondisi madrasah yang lain. Pada langkah pemenuhan standar, pihak sekolah memerlukan adanya standar dan pedoman pemenuhan mutu dari pihak eksternal yaitu pemerintah sebagai acuan.<sup>47</sup>

Kemandirian madrasah dalam melakukan penjaminan mutu ditunjukkan pada keberlangsungan kegiatan yang dijalankan. Kegiatan dalam rangka pemenuhan mutu MA Darul Huda akan dirancang oleh penanggung jawab dan tim yang sudah ditunjuk dalam rapat yang membahas konsep kegiatan, teknis kegiatan, bidang-bidang kegiatan dan penanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan, madrasah dapat melakukan tahap berikut:<sup>48</sup>

1. Menetapkan penanggung jawab kegiatan
2. Penanggung jawab menyusun tim organisasi pelaksana dan pihak-pihak yang dilibatkan
3. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan
4. Menetapkan bukti fisik yang mendukung keterlaksanaan kegiatan
5. Program kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu agar memperoleh capaian yang signifikan.

Hal tersebut menunjukkan kesuaian tindakan madrasah dengan hal yang seharusnya dilakukan dalam penjaminan mutu. Prinsip sistematis dan berkelanjutan yang diterapkan adalah sistematis dan berkelanjutan. Selain kemandirian yang tercermin dalam hal ini, juga terdapat sebuah tanggung jawab yang sudah sepantasnya dilakukan oleh penanggungjawab

<sup>45</sup> Muskinul Fuad, *Model Pengembangan Kerpibadian Muslim di Pesantren*, 63-74

<sup>46</sup> Ridlwan A. Sani et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 117-118

<sup>47</sup> Ridwan Abdullah Sani et.al., *Penjaminan Mutu Sekolah*, 32-33

<sup>48</sup> Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 133

kegiatan yang dibebankan tugas untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan madrasah dengan melakukan perencanaan yang jelas.

Kegiatan yang dilaksanakan akan dipantau oleh kepala madrasah dan sebelumnya akan ada sosialisasi tentang kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya juga memerlukan koordinasi dengan pelaksana kegiatan agar kegiatan berjalan lancar. Rencana yang telah ditetapkan, pelaksanaannya dan hasil pemantauan program dan kegiatan hendaknya selalu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>49</sup> Dalam penjaminan mutu juga memerlukan pelatihan bagi pelaksana kegiatan. Pelatihan akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan karena terkait dengan pemahaman kegiatannya.<sup>50</sup> Hal tersebut menyiratkan nilai tanggung jawab dan kebersamaan terhadap kegiatan madrasah dengan adanya pemantauan dari atas pada pelaksana kegiatan.

Sesuai dengan penjelasan di atas, kegiatan yang terlaksana akan dilaporkan terkait pelaksanaan kegiatan, hasil, kendala dan rekomendasinya kepada madrasah yaitu kepala madrasah, guru dan seluruh pemangku kepentingan lembaga melalui pertemuan resmi seperti rapat guru, PWM dan rapat internal pondok. Pelaksanaan pemenuhan mutu memerlukan bukti fisik dalam pelaksanaan kegiatan.<sup>51</sup> Hal ini mengisyaratkan nilai tanggung jawab terkait kegiatan yang dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan pemenuhan mutu di MA Darul Huda memerlukan profesionalisme para pelaku dan pelaksana kegiatan, manajemen madrasah yang transparan, akomodatif dan demokratis, keterlibatan dan dukungan orang tua murid, masyarakat dan tokoh masyarakat, tokoh agama berupa sumbangan dana, tenaga dan pikiran serta memerlukan beberapa kegiatan penunjang yang didukung oleh pengurus pondok dan pengasuh. Selain itu, memerlukan dukungan dari pemerintah terkait kebijakan pendidikan. Hal ini selaras dengan penjelasan terkait pemenuhan mutu bahwa pelaksanaan pemenuhan mutu memerlukan komitmen dari para pemangku kepentingan satuan pendidikan.<sup>52</sup> Penjaminan kualitas membutuhkan orang yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan pada bidang yang dibutuhkan dalam perancangan.<sup>53</sup> Hal ini juga menunjukkan nilai kebersamaan para pemangku kepentingan karena penjaminan mutu memerlukan dukungan semua elemen baik dari pelaku internal maupun eksternal.

Nilai sosial dan kebersamaan juga ditunjukkan dalam langkah madrasah yang berupaya meningkatkan kinerja guru dengan memotivasi guru, menyadarkan tugas dan tanggung jawabnya, memfasilitasi guru dengan mengadakan workshop serta memposisikan guru sesuai keahlian yang dimiliki. Madrasah juga melakukan tes bagi peserta didik baru untuk mengetahui kemampuan awal. Madrasah akan membangun kesadaran mutu dan komunikasi yang baik serta usaha yang maksimal dan kesabaran guna memperlancar pemenuhan mutu. Keberhasilan melaksanakan manajemen pada suatu proses sangat ditentukan oleh iklim organisasi, yakni komunikasi dan tim kerja yang kompak.<sup>54</sup> Selain nilai sosial yang tercermin, dalam hal ini juga terdapat nilai kesederhanaan dengan lebih mementingkan pada perencanaan dan pelaksanaan serta anggaran yang efektif dan efisien sehingga meminimalisir tenaga, waktu dan biaya.

---

<sup>49</sup> Ridlwan A. Sani et.al., *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 139

<sup>50</sup> Deden Makbulloh, *Pendidikan Islam dan Sistem Pejaminan Mutu*, 92-95

<sup>51</sup> Ridlwan A. Sani et.al, *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 133

<sup>52</sup> *Ibid*, 139

<sup>53</sup> Uhar Saputra, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2013) 262-263

<sup>54</sup> Ridwan Abdullah Sani et.al, *Penjaminan Mutu Sekolah*, 32-33

## 5. Evaluasi Pemenuhan Mutu

Setelah pelaksanaan pemenuhan mutu selesai, madrasah selalu melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan rutin melalui pertemuan resmi seperti rapat guru. Evaluasi pelaksanaan mutu dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap proses pemenuhan mutu untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan.<sup>55</sup> Penjaminan mutu biasanya membutuhkan evaluasi secara terus menerus.<sup>56</sup> Evaluasi yang dikemas dalam bentuk musyawarah merupakan bentuk pelestarian nilai pesantren yang berupa nilai demokrasi seperti yang dikembangkan pesantren dalam menyelesaikan setiap permasalahan.

Evaluasi pemenuhan mutu berkaitan dengan hasil kegiatan, kendala kegiatan dan solusi atau rekomendasi yang tepat. Evaluasi pemenuhan mutu sesungguhnya digunakan untuk memperbaiki tahap kegiatan atau kegiatan selanjutnya. Evaluasi yang berkaitan dengan hasil kegiatan ini merupakan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yaitu memeriksa hasil dari pelaksanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil pemenuhan dengan *output*, *outcome* dan dampak pemenuhan mutu.<sup>57</sup> Sedangkan evaluasi yang berkaitan dengan kendala kegiatan merupakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif yang digunakan untuk memeriksa keterlaksanaan rencana pemenuhan mutu yang berjalan disatuan pendidikan yang berfokus pada keterlaksanaan input yang meliputi anggaran dan sumber daya dan keterlaksanaan proses seperti keterlaksanaan dan kualitas proses latihan.<sup>58</sup> Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dan nilai kemandirian madrasah, penanggung jawab dan tim pelaksana dalam melakukan pemenuhan mutu untuk memenuhi hal peserta didik sebagai pengguna jasa.

Terkait kendala kegiatan, madrasah melakukan menentukan rekomendasi berdasarkan hasil beberapa usulan guru dan dipilih yang terbaik. Evaluasi pemenuhan mutu dapat dilakukan dengan menyusun rencana evaluasi, membuat indikator dan instrumen evaluasi, pelaksanaan evaluasi dan analisis hasil evaluasi dan penyusunan rekomendasi.<sup>59</sup> Saling menghargai dalam penentuan rekomendasi ini merupakan nilai sosial dan nilai moralitas yang selalu ditanamkan pesantren.

Evaluasi pemenuhan mutu MA Darul Huda diadakan dalam pertemuan resmi yang dihadiri oleh penanggung jawab dan tim dan pelaksana kegiatan. Madrasah juga memanfaatkan media sosial untuk secara cepat dan efektif. Evaluasi dilakukan MA Darul Huda tidak hanya diakhir namun juga pada tahap kegiatan awal tersebut untuk beberapa kegiatan tertentu. Penjaminan mutu merupakan kegiatan untuk mencapai biaya efektif dan membantu meningkatkan produktivitas dan dapat mencapai kepuasan pelanggan.<sup>60</sup> Penggunaan cara-cara modern ini menggambarkan nilai yang dianut oleh MA Darul Huda yang diterapkan di pesantrennya yaitu menggunakan metode lama yang baik dan mengambil metode baru yang lebih baik. Dalam hal ini, pemanfaatan media sosial untuk evaluasi merupakan metode baru yang diambil MA Darul Huda agar evaluasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan nilai moralitas yang berupa perbaikan diri.

<sup>55</sup> Ridlwan A. Sani et.al, Sistem Penjaminan Mutu Internal: *Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 32-35

<sup>56</sup> Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah: Membangun Sekolah yang Bermutu* (Bandung: Alfabeta, 2013) 65

<sup>57</sup> Ridlwan A. Sani et.al, Sistem Penjaminan Mutu Internal: *Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*, 147

<sup>58</sup> *Ibid*,

<sup>59</sup> *Ibid*, 32-35

<sup>60</sup> Uhar Saputra, *Administrasi Pendidikan*, 262-263

## PENUTUP

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan sebuah langkah pengembangan manajemen mutu. Dalam hal ini, nilai-nilai yang menjadi idealism *stakeholder* akan sangat mempengaruhi penerapan prinsip pada jalannya sistem penjaminan mutu seperti musyawarah sebagai nilai demokrasi, mementingkan keefektifan dan efisiensi sebagai nilai kesedarhanaan dan lainnya. Sistem penjaminan mutu MA Darul Huda

Pada penetapan standar mutu mengacu pada SNP yang disesuaikan dengan visi misi dan kondisi madrasah. Pada pemetaan mutu, madrasah melakukan EDM untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, peluang, ancaman dan rekomendasi yang tepat. Perencanaan pemenuhan mutu disusun berdasarkan hasil pemetaan mutu dalam bentuk RKM dan RKTm dalam berisi sasaran mutu, program, indikator keberhasilan penanggung jawab dan jadwal kegiatan serta sumber pendanaan dan anggaran. Pemenuhan mutu dirancang oleh penanggung jawab kegiatan dengan membentuk tim pelaksana kegiatan, teknis kegiatan, jadwal dan rincian anggaran. Evaluasi pemenuhan mutu didasarkan pada laporan terkait pelaksanaan kegiatan dan hasilnya, kendala serta rekomendasi untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Secara umum sistem penjaminan mutu internal di MA Darul Huda didasari nilai moralitas yang baik. Nilai moralitas ini sesuai dengan prinsip-prinsip sistem penjaminan mutu internal. Sinergi antara nilai dan prinsip ini akan menjadikan sistem penjaminan mutu internal semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sani et.al, Ridlwan. *Sistem Penjaminan Mutu Internal: Seri Penjaminan Mutu Pendidikan*. Tangerang: Tsmart Printing. 2018
- Abdullah Sani et.al, Ridlwan. *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015
- Arif, Mahmud. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 2008
- Arifin, Zainal *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Diva Press. 2012
- Fattah, Nanang. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya. 2012
- Fuad, Muskinul. *Model Pengembangan Kerpibadian Muslim di Pesantren*. Yogyakarta: Lontar Mediatama. 2018
- Harian Bhirawa, *BAN S/M Minta Sekolah Tuntaskan Akreditasi*, <http://harianbhirawa.com/2018/11/ban-sm-minta-sekolah-tuntaskan-akreditasi/>, 14 November 2018
- Karwati dan Donni Juni Priansa, Euis. *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah: Membangun Sekolah yang Bermutu*. Bandung: Alfabeta. 2013
- MA Darul Huda, MA Darul Huda dengan Siswa Terbanyak yang Diterima pada Jalur SPAN-UM-PTKIN, <http://www.darulhudamayak.net/ma-darul-huda-dengan-siswa-terbanyak-yang-diterima-pada-jalur-span-um-ptkin/>.
- MA Darul Huda, MA Darul Huda Dominasi 10 Peringkat Teratas UAMBNBK Se-Ponorogo, <http://darulhudamayak.net/ma-darul-huda-dominasi-10-peringkat-teratas-umbnbk-se-ponorogo/>.
- Makbulloh, Deden. *Pendidikan Islam dan Sistem Pejaminan Mutu*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Media Indonesia, *55% Sekolah dan Madrasah Terakreditasi B*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/204145-55-Sekolah-Dan-Madrasah-Terakreditasi-B>.

- Mulayasana, Dedy. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Dasar Dan Menengah, [Http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf](http://Pmp.Dikdasmen.Kemdikbud.Go.Id/Files/Docs/02.Pdf)
- Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2006
- Saputra, Uhar. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama. 2013
- Umar, Yusuf *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu* (Bandung: Refika Aditama, 2016) 6-7
- Yasin, Fatah. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2008
- Zazin, Nur. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011